

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi UMKM Di Desa Cibiru Hilir Kabupaten Bandung

Theola Rabbi Agnari¹, Nenden Liska Gipari²

¹Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, theolaagnari@gmail.com

¹Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, nendenliska@uinsgd.ac.id

Abstrak

Program pemberdayaan UMKM di Desa Cibiru Hilir bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pendampingan terstruktur, berfokus pada akses informasi program pemerintah, transformasi pemasaran, dan permodalan. Penelitian ini mengaplikasikan Metode Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat (SISDAMAS) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mencakup tahapan pemetaan konsep dan sosial, serta pelaksanaan program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan ketua pemberdayaan UMKM dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan program berhasil: (1) meningkatkan pemahaman UMKM tentang sertifikasi halal, HAKI, dan P-IRT; (2) memperluas akses pemasaran ke pasar regional melalui pelatihan; (3) memfasilitasi akses pendanaan pemerintah seperti KUR; serta (4) membentuk komunitas UMKM yang memperkuat jejaring sosial dan bisnis. Disimpulkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha, tetapi juga menciptakan ekosistem UMKM yang berkelanjutan melalui integrasi aspek ekonomi dan sosial. Untuk optimalisasi, diperlukan pendampingan berkelanjutan dan penyederhanaan prosedur administrasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, Pengembangan UMKM, Desa Cibiru Hilir

Latar Belakang

Desa Cibiru Hilir merupakan salah satu desa di Indonesia yang memiliki potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup beragam dan menjanjikan. Berdasarkan data yang didapat dari narasumber, terdapat lebih dari 100 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari produk makanan olahan seperti kue kering, telur asin, tempe, hingga sayuran segar. Keberagaman produk dan jasa ini sebenarnya dapat menjadi modal besar untuk pengembangan ekonomi lokal jika dikelola dengan baik (Wawancara, Mei 2025).

Namun, sebelum adanya program pemberdayaan yang sistematis, UMKM di Desa Cibiru Hilir menghadapi berbagai kendala struktural yang menghambat pertumbuhannya. Pertama, mayoritas pelaku UMKM beroperasi secara mandiri tanpa adanya koordinasi atau kelembagaan yang kuat. Setiap usaha berjalan sendiri-sendiri tanpa kolaborasi, sehingga sulit untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih besar (Wawancara, Mei 2025).

Kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang juga menjabat sebagai ketua pemberdayaan UMKM di desa ini, ditemukan bahwa kurangnya akses terhadap informasi menjadi masalah utama. Pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui secara detail program-program pemerintah yang sebenarnya dapat mendukung pengembangan usaha mereka, seperti bantuan modal usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM, pendaftaran sertifikasi halal untuk produk makanan, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk melindungi produk kreatif, atau perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang merupakan syarat utama untuk memasarkan produk makanan secara lebih luas. Selain itu, pemasaran masih mengandalkan jaringan lokal dan mulut ke mulut, tanpa pemanfaatan platform digital yang sebenarnya dapat memperluas jangkauan pasar.

Ketiga, masalah permodalan juga menjadi kendala signifikan. Sebagian besar pelaku UMKM mengandalkan modal sendiri atau pinjaman informal dengan bunga tinggi. Akses terhadap perbankan atau lembaga keuangan formal sangat terbatas karena ketiadaan agunan dan kurangnya pemahaman tentang prosedur pengajuan kredit. Padahal, menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri Aniversari (2023) akses permodalan yang terjangkau merupakan salah satu faktor kunci dalam pengembangan UMKM, terutama untuk meningkatkan kapasitas produksi dan diversifikasi produk.

Selain itu, aspek legalitas usaha juga sering diabaikan. Hal ini menyebabkan produk-produk lokal kesulitan bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk dalam tender pengadaan barang pemerintah atau kerja sama dengan pasar modern. Rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas ini juga membuat produk-produk UMKM Desa Cibiru Hilir rentan terhadap pembajakan dan tidak memiliki nilai tambah di mata konsumen. Dalam konteks inilah program pemberdayaan UMKM di Desa Cibiru Hilir hadir sebagai solusi. Program ini tidak hanya memberikan akses terhadap informasi dan pelatihan, tetapi juga mendampingi pelaku UMKM dalam mengurus berbagai perizinan dan sertifikasi. Dampaknya, telah terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah UMKM yang memiliki legalitas lengkap dan mampu menjual produk hingga ke tingkat regional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Adhistya Ayu (2025) yang menyatakan bahwa pendampingan terstruktur dapat meningkatkan kapasitas UMKM secara holistik, mulai dari aspek produksi hingga pemasaran.

Dengan demikian, kajian ini menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana program pemberdayaan telah memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM di Desa Cibiru Hilir, sekaligus mengidentifikasi tantangan-tantangan yang masih perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan program ini di masa depan.

Tinjauan Pustaka

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional (Parsons, 1951; Merton, 1968) memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian (struktur) yang saling terkait untuk menciptakan keseimbangan. Dalam konteks pemberdayaan UMKM Desa Cibiru Hilir, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana program pendampingan berfungsi sebagai mekanisme adaptasi dan integrasi sosial. Teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons (1951) memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami pemberdayaan UMKM di Desa Cibiru Hilir. Melalui skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency), program pemberdayaan ini dapat dipandang sebagai subsistem yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan sistem sosial-ekonomi desa.

Pada aspek adaptasi (A), program berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian terhadap tuntutan pasar modern melalui pelatihan sertifikasi halal, HAKI, dan P-IRT yang mentransformasikan usaha tradisional menjadi entitas formal. Dalam pencapaian tujuan (G), program ini menciptakan tujuan kolektif melalui pembentukan struktur kepengurusan UMKM desa yang mengarahkan pada peningkatan omzet dan perluasan pasar. Aspek integrasi (I) terwujud melalui pembentukan komunitas UMKM yang berfungsi sebagai media integrasi sosial sekaligus jejaring bisnis, sementara fungsi pemeliharaan pola (L) tercermin dari pelestarian kearifan lokal dalam proses produksi dan penguatan identitas kewirausahaan desa. Teori ini cukup relevan untuk menjelaskan bagaimana program pemberdayaan berhasil mengatasi

disfungsi sistem seperti isolasi usaha dan ketidaktahuan regulasi, sekaligus memperkuat hubungan simbiosis antara perkembangan UMKM dengan stabilitas sosial desa.

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas berbagai aspek pemberdayaan UMKM di pedesaan, yang relevan dengan konteks pengembangan UMKM di Desa Cibiru Hilir. Penelitian pertama dari Aniversari (2023), dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Akses Permodalan, Financial Literacy, Kreativitas dan Digital Marketing terhadap Pengembangan UMKM" mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Desa Merak Batin. Penelitian kuantitatif dengan 67 responden ini menggunakan analisis PLS-SEM menemukan bahwa akses permodalan dan kreativitas berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha, sementara literasi keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan. Temuan ini relevan dengan kondisi UMKM di Cibiru Hilir yang juga menghadapi kendala permodalan. Penelitian ini menggunakan teori inklusi keuangan dan menjadi dasar pentingnya pendampingan dalam pengurusan kredit usaha.

Berikutnya, penelitian kedua Astutiningrum (2019), yang meneliti tentang pengaruh pelatihan, pendampingan dan pembinaan pemerintah terhadap keberhasilan UMKM di Semarang Utara. Dengan metode kuantitatif terhadap 86 UMKM, penelitian ini menemukan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi 24,4% terhadap keberhasilan usaha. Secara parsial, pelatihan memberikan pengaruh terbesar (10,82%). Hasil ini memperkuat pentingnya program pendampingan terstruktur seperti yang dilakukan di Cibiru Hilir, khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM.

Kemudian penelitian dari Andriani (2023), dalam penelitian kualitatifnya mengkaji efektivitas pendampingan UMKM di Kelurahan Darmo, khususnya dalam aspek legalitas dan pemasaran. Melalui wawancara mendalam dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas dan kemampuan pemasaran. Temuan ini sejalan dengan program pemberdayaan di Cibiru Hilir yang juga fokus pada pendampingan legalitas (PIRT, halal) dan perluasan pasar.

Pemberdayaan UMKM merujuk pada proses meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya (Kemenkop UKM, 2020). Peraturan Kemenkop UKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) nomor 1 tahun 2020 membahas tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik untuk meningkatkan kapasitas koperasi, usaha kecil, dan menengah (UKM). Ini termasuk pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya. Peraturan ini mengatur bagaimana DAK nonfisik digunakan untuk mendukung pertumbuhan koperasi dan UKM. Beberapa poin penting meliputi: Pelatihan (DAK nonfisik dapat digunakan untuk membiayai pelatihan bagi SDM koperasi dan UKM. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas, misalnya melalui pelatihan manajemen, pemasaran, atau produksi), Pendampingan (Peraturan ini juga mengatur penggunaan DAK nonfisik untuk pendampingan, yang mencakup bimbingan, konsultasi, advokasi, dan fasilitasi dari lembaga atau tenaga pendamping), Akses Sumber Daya (DAK nonfisik dapat digunakan untuk memberikan akses bagi koperasi dan UKM terhadap berbagai sumber daya, seperti informasi pasar, teknologi, atau pendanaan).

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif yang diintegrasikan dengan

kerangka Metode Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat (SISDAMAS) untuk mendokumentasikan dan menganalisis program pemberdayaan UMKM di Desa Cibiru Hilir. Pendekatan SISDAMAS dipilih karena kemampuannya dalam mengelola informasi secara sistematis guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pemberdayaan. Penerapan SISDAMAS dalam penelitian ini mencakup empat tahapan kunci:

1. Pemetaan Konsep dan Sosial

Tahap awal penelitian ini berfokus pada pemetaan konsep dan sosial di Desa Cibiru Hilir. Ini dilakukan untuk memahami kondisi eksisting, potensi, serta kendala yang dihadapi oleh UMKM di desa tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ketua pemberdayaan UMKM desa. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai latar belakang terbentuknya program pemberdayaan UMKM, struktur organisasi, serta perkembangan UMKM di Desa Cibiru Hilir.

Selain itu, studi dokumen profil UMKM peserta program digunakan sebagai data sekunder untuk melengkapi pemetaan sosial, termasuk jenis usaha, jumlah pelaku UMKM, dan sebaran lokasi. Data ini memberikan fondasi informasi yang kuat untuk memahami konteks sosial dan ekonomi masyarakat sebelum intervensi program.

2. Penyusunan Program Partisipatif

Meskipun penelitian ini bersifat deskriptif terhadap program yang sudah berjalan, prinsip penyusunan program partisipatif dalam SISDAMAS direfleksikan melalui analisis bagaimana kebutuhan UMKM diidentifikasi dan diintegrasikan ke dalam program pemberdayaan. Data dari tahap pemetaan konsep dan sosial digunakan untuk mengidentifikasi gap informasi dan kebutuhan akses yang menjadi dasar perancangan program "Gerakan Pangan Murah" dan pendampingan lainnya yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM).

3. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini difokuskan pada observasi dan dokumentasi program pemberdayaan yang berlangsung. Peneliti meliputi kegiatan "Gerakan Pangan Murah" yang diselenggarakan oleh DPM pada tanggal 19 Mei 2025 di sepanjang Jalan Pilar Biru Raya. Pengamatan ini mencakup interaksi antara pendamping dan pelaku UMKM, jenis produk yang dipasarkan, serta respons masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan adalah puncak dari proses SISDAMAS dalam penelitian ini. Data yang terkumpul dari wawancara dan studi dokumen, serta observasi pelaksanaan program, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu 1) reduksi data adalah mengkategorikan informasi kunci dari transkrip wawancara dan dokumen profil UMKM untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait keberhasilan dan tantangan program; (2) penyajian data, yaitu menyajikan temuan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, menjelaskan dampak program pemberdayaan UMKM di Desa Cibiru Hilir; (3) penarikan kesimpulan, yaitu memverifikasi temuan melalui triangulasi sumber antara data wawancara (narasumber) dan dokumen resmi (profil UMKM, logbook) untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian; dan 4) hasil analisis disajikan secara komprehensif untuk menggambarkan efektivitas dan tantangan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Desa Cibiru Hilir, sejalan dengan prinsip pelaporan yang transparan dan akuntabel dalam SISDAMAS.

Hasil Kegiatan

Program pemberdayaan UMKM di Desa Cibiru Hilir dilaksanakan pada 19 Mei 2025 dengan fokus pada sektor pangan. Saya bertugas mendokumentasikan kegiatan dan mewawancarai ketua pemberdayaan UMKM.

Tabel 1
Daftar Peserta UMKM

No.	Ket.	Alamat	Nama/Merk
1	Kamiati	Komplek Bumi Harapan Blok. CC 8 No.42	Peyek Kirana
2	Tini Martiningsih	Komplek Bumi Harapan Blok. AA 15 No.25	T.mart
3	Wiwin Wastini	Cibiru Hilir Rt.2 Rw.3	Boewin
4	Pipin Kuniasih	Komplek Bumi Harapan Blok CC 9 No.25A	KWT Binangkit Lestari
5	Richo Parmi Dika Nugroho	Komplek Bumi Harapan Blok. CC 8 No.33	Kulehe.id
6	Nina Herlina	Komplek Bumi Harapan Rt.04 Rw.11	Ifa cookies
7	Armi Maulida Gusmiarni	Komplek Bumi Harapan Blok BB.6 No.4	Sweet Castle
8	Monika Natalia	Jln Cibiru Hilir No.12 Rt.01 Rw.01	Monikue Kitchen
9	Neng Bevi Susilawati	Kampung Babakan Sayang Rt.3 Rw.5	Arumi Cakek
10	Kurniati Chadariah	Komplek Bumi Harapan Blok AA 15 No. 31	Dapur BHC 31
11	Henny Nuraini Merti Ningsih	Komplek Bumi Harapan Blok EE No.22	Kedai Uni's

12	Muhammad Irawan	Komplek Bumi Harapan Blok AA No.34	Ayam Potong Basmalah dan Percetakan
13	Mardiah	Komplek Bumi Harapan Blok AA18 No.22	Kabita
14	Devita Nurul Fatimah	Komplek Bumi Harapan Blok AA 6 No.1	Kedai Gemvita
15	Nurhayani	Komplek Bumi Harapan Blok BB 6 No.15	Nale
16	Parid Maulana	Komplek Bumi Harapan Blok BB 6 No.21	Laris Bakery
17	Anies Ahmad	Komplek Bumi Harapan Blok BB 6 No.16	Aroma Catering dan Snack
18	Tuti Nurhayati	Kampung babakan cimekar RT.4 RW.15	Chocobro lumer dan Khafizti Beauty
19	Yuyun Maesaroh	Komplek Bumi Harapan Blok EE 4 No.3	Komplek Bumi Harapan Blok EE 4 No.3
20	Reni Restiani	Komplek Bumi Harapan Blok BB 8 No.2	Melcheese

Sumber: Dokumen Desa (2022)

Berikut merupakan sebagian kecil list dari nama peserta pemberdayaan UMKM di desa Cibiru Hilir.

Tabel 2 Logbook

No.	Nama Kegiatan	Ket.	Tanggal
1	Kunjungan ke Kantor Desa Cibiru Hilir	Meminta izin kegiatan penelitian	8 Mei 2025
2	Bertemu dengan Sekretaris Desa	Berbincang mengenai tugas penelitian	16 Mei 2025
3	Diarahkan ke Ketua Pemberdayaan UMKM Cibiru Hilir	Berbincang mengenai tugas penelitian melalui ponsel	16-20 Mei 2025
4	Melihat program kerja pemberdayaan UMKM yang diinisiasi oleh DPM	UMKM berjualan di sepanjang jalan Pilar biru.	19 Mei 2025
5	Bertemu dengan Ketua Pemberdayaan	Berbincang mengenai pemberdayaan UMKM Cibiru Hilir	20 Mei 2025

Gambar 1
Pemberdayaan UMKM Desa Cibiru Hilir



Sumber: Instagram (2023)

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terkait program pemberdayaan UMKM di Desa Cibiru Hilir, terdapat beberapa temuan penting yang menunjukkan dampak positif dari program pemberdayaan ini.

1. Peningkatan pemahaman tentang program pemerintah

Sebelum adanya program pemberdayaan, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Cibiru Hilir masih awam mengenai berbagai bantuan dan fasilitas dari pemerintah untuk pengembangan usaha. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor yaitu minimnya Sosialisasi tentang program pemerintah yang seringkali tidak sampai ke pelaku UMKM di tingkat desa, atau disampaikan dalam bentuk yang sulit dipahami, dan keterbatasan akses karena banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki akses ke platform digital atau forum-forum resmi tempat informasi tersebut dibagikan.

Melalui program pemberdayaan ini, terjadi perubahan signifikan dalam hal seperti, akses informasi yang lebih terstruktur, dan juga pemanfaatan program nyata. Program pemberdayaan berperan sebagai *jembatan informasi* yang menghubungkan pelaku UMKM dengan kebijakan pemerintah. Misalnya sosialisasi tentang cara mengurus sertifikasi halal, HAKI, dan P-IRT dilakukan secara tatap muka dengan pendampingan langkah demi langkah. Karena itu, pelaku UMKM tidak hanya sekadar *tahu*, tetapi juga mulai *memanfaatkan* berbagai program, seperti: Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis yang sebelumnya dianggap rumit, kini beberapa UMKM makanan sudah mulai mengurusnya.

Program Pendanaan seperti modal usaha ternak lele atau pelatihan kewirausahaan, yang langsung berdampak pada peningkatan omzet. Pelatihan Teknis seperti pelatihan pengemasan produk agar lebih menarik dan memenuhi standar pasar. Menurut narasumber, dampak dari peningkatan pemahaman ini tidak hanya bersifat instan, tetapi juga menciptakan *mindset* baru di kalangan pelaku UMKM:

"Dulu kami hanya menjual seadanya, sekarang mulai terpikir untuk mengembangkan merek dan legalitas usaha" (Wawancara dengan Ketua Pemberdayaan UMKM, 2025).

2. Transformasi sistem pemasaran

Program pemberdayaan telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi UMKM di Desa Cibiru Hilir. Dari sisi kapasitas usaha, pelaku UMKM kini memiliki pengetahuan yang lebih memadai tentang manajemen pengembangan usaha, termasuk perencanaan keuangan dan strategi ekspansi. Pengetahuan ini tidak hanya diperoleh melalui pelatihan formal, tetapi juga melalui *sharing session* antar sesama pelaku UMKM dalam forum yang difasilitasi oleh program pemberdayaan.

Dalam aspek pemasaran, terbukanya akses ke pasar yang lebih luas menjadi salah satu pencapaian penting. Beberapa produk UMKM yang sebelumnya hanya dijual secara lokal, kini mulai menembus pasar regional melalui kerja sama dengan supermarket dan toko-toko modern. Transformasi ini tidak lepas dari pelatihan pemasaran dan standarisasi produk yang diberikan dalam program pemberdayaan. Narasumber menjelaskan:

"Banyak produk UMKM kami yang sebenarnya berkualitas dan layak masuk pasar besar, tapi selama ini terkendala kurangnya pengetahuan tentang distribusi. Sekarang melalui program pelatihan dari pemerintah yang kami sosialisasikan, mereka mulai paham cara memperluas pemasaran" (Wawancara, Mei 2025).

Temuan ini memperkuat penelitian Andriani (2023) tentang pentingnya pendampingan dalam transformasi pemasaran UMKM.

3. Akses Permodalan dan Pengembangan Usaha

Aspek krusial lainnya dalam program pemberdayaan UMKM di Desa Cibiru Hilir adalah perannya sebagai jembatan antara pelaku usaha dengan berbagai program pendanaan dari pemerintah. Sebelum adanya program ini, mayoritas pelaku UMKM mengandalkan modal sendiri atau pinjaman informal dengan bunga tinggi untuk mengembangkan usaha mereka. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan skala produksi dan kualitas produk.

Melalui program pemberdayaan, pelaku UMKM kini mendapatkan informasi yang jelas tentang berbagai skema pendanaan yang tersedia, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program khusus dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta bantuan modal bergulir dari pemerintah daerah. Tidak hanya sekadar memberikan informasi, program ini juga memberikan pendampingan konkret dalam proses pengajuan pinjaman, mulai dari penyusunan proposal usaha hingga pengurusan persyaratan administrasi.

Dampak dari akses permodalan ini terlihat pada beberapa UMKM yang mulai melakukan ekspansi usaha. Beberapa bahkan mulai mempekerjakan tenaga tambahan dari lingkungan sekitar, yang turut berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja di desa.

4. Fungsi Sosial Komunitas UMKM

Komunitas UMKM yang terbentuk melalui program pemberdayaan di Desa Cibiru Hilir telah berkembang menjadi lebih dari sekadar wadah bisnis semata. Komunitas ini berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial antar pelaku usaha, menciptakan jejaring dukungan yang berharga di tingkat desa. Sebelum terbentuknya komunitas ini, para pelaku UMKM cenderung bekerja secara individual dengan interaksi terbatas hanya pada lingkup keluarga atau tetangga terdekat. Kini, melalui pertemuan rutin yang diadakan setiap bulan, mereka tidak hanya berdiskusi tentang pengembangan usaha, tetapi juga membangun hubungan personal yang lebih erat.

Salah satu dampak nyata dari komunitas ini adalah terciptanya budaya saling membantu antar anggota. Misalnya, ketika salah satu anggota kesulitan bahan baku, anggota lain yang kebetulan memiliki stok berlebih tidak segan untuk meminjamkannya. Ada pula praktik berbagi pelanggan, dimana satu UMKM akan merekomendasikan produk anggota lain kepada pembelinya jika dirasa cocok.

Komunitas ini juga menjadi media efektif untuk transfer pengetahuan informal. Pengalaman sukses maupun kegagalan dalam menjalankan usaha secara spontan dibagikan dalam setiap pertemuan, menciptakan proses belajar kolektif yang alami. Seorang pelaku UMKM makanan olahan mengaku mendapatkan ide pengemasan kreatif setelah melihat contoh dari anggota lain, tanpa perlu mengikuti pelatihan formal. Interaksi semacam ini sesuai dengan konsep pemberdayaan berbasis komunitas (Kemenkop UKM, 2020) yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya dan pengetahuan lokal.

Tidak hanya terbatas pada urusan bisnis, komunitas UMKM ini juga menjadi sarana penting dalam menjaga tradisi gotong royong khas masyarakat desa. Mereka sering mengadakan kegiatan sosial bersama seperti bazar amal. Aspek sosial ini ternyata memberikan dampak positif

tidak langsung terhadap usaha, karena semakin memperkuat citra positif UMKM di mata masyarakat.

Meski demikian, pengelolaan komunitas ini masih menghadapi beberapa tantangan. Kehadiran dalam pertemuan rutin kadang masih kurang maksimal karena kesibukan anggota. Keberadaan komunitas UMKM ini telah membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari penguatan sosial. Dengan dasar persaudaraan yang kuat, para pelaku UMKM di Desa Cibiru Hilir tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Hal ini sejalan dengan filosofi masyarakat Indonesia yang mengedepankan gotong royong dalam membangun perekonomian.

Tabel 3
Peran Pemberdayaan dalam Pengembangan UMKM Desa Cibiru Hilir

No.	Aspek	Kondisi Awal	Dampak Program
1	Pemahaman Program Pemerintah	Minim sosialisasi, keterbatasan akses informasi	Akses informasi terstruktur tentang sertifikasi halal, HAKI, P-IRT Pemanfaatan program nyata (pendanaan, pelatihan)
2	Sistem Pemasaran	Hanya pemasaran lokal	Akses pasar regional (supermarket/toko modern) Pelatihan standardisasi produk Pelatihan pemasaran produk menembus pasar regional
3	Akses Permodalan	Modal sendiri/pinjaman informal	Akses KUR dan program pendanaan pemerintah Pendampingan pengajuan proposal Ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja
4	Fungsi sosial komunitas	Bekerja individual	Jejaring dukungan usaha Transfer pengetahuan informal Kegiatan sosial bersama (bazar amal)

Kesimpulan

Program pemberdayaan UMKM di Desa Cibiru Hilir telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui tiga aspek utama: (1) peningkatan pemahaman tentang program pemerintah melalui pendampingan sertifikasi halal, HAKI, dan P-IRT; (2) transformasi sistem pemasaran dari lokal ke regional melalui pelatihan dan standarisasi produk; serta (3) perluasan akses permodalan via program KUR dan bantuan pemerintah. Selain manfaat ekonomi, terbentuknya komunitas UMKM telah memperkuat jejaring sosial berbasis gotong royong, menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Bagi instansi terkait, disarankan untuk mengembangkan sistem keanggotaan UMKM yang berkelanjutan dengan rutin menyelenggarakan kegiatan bersama untuk mempertahankan partisipasi anggota. Untuk peneliti/praktisi selanjutnya, dapat dikembangkan studi tentang penyederhanaan prosedur pengajuan bantuan modal dengan membuat panduan visual yang mudah dipahami.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian dan program pemberdayaan UMKM di Desa Cibiru Hilir, khususnya Bapak H. Dadang Silahudin, S.IP. (Kepala Desa Cibiru Hilir) atas izin dan fasilitas yang diberikan. Bapak Idin Saprudin, S.Ag. (Sekretaris Desa Cibiru Hilir) atas bantuan administrasi dan koordinasi. Ibu Monika Sahid, S.Hi. (Ketua Komunitas Pemberdayaan UMKM Cibiru Hilir) atas waktu, pengetahuan, dan kolaborasi selama pendampingan UMKM. Tak lupa, penghargaan kepada seluruh pelaku UMKM Desa Cibiru Hilir yang telah berpartisipasi aktif, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten yang mendukung program ini. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut untuk pengembangan UMKM yang berkelanjutan

Referensi

- Ade Ika Astutiningrum. (2019). *Pengaruh Pelatihan, Pendampingan, Dan Pembinaan Pemerintah Kota Semarang Terhadap Keberhasilan UMKM Kecamatan Semarang Utara*. Universitas Negeri Semarang.
- Adhistya Ayu Andriani, & Acep Samsudin. (2025). Optimalisasi Pendampingan Umkm Industri Rumahan Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Melalui Legalitas Dan Pemasaran Di Kelurahan Darmo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1).
- Aep Kusnawan. (2024). *Petunjuk Teknis Kkn Sisdamas Uin Sgd Bandung Tahun 2024*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Miles & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Putri Aniversari. (2023). Pengaruh Akses Permodalan, Financial Literacy, Kreativitas Dan Digital Arketing Terhadap Pengembangan Usaha Pada Umkm Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Tahun 2023. *Manajemen Bismis Syariah*.
- Robert K. Merton. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Pass. Talcott Parsons. (1951). *The Social System*. Free Press.
-